

NEGARA, DAN GERAKAN KEAGAMAAN DALAM POLITIK INDONESIA

Suhaimi

ABSTRAK

Ketika negara moderen sekuler muncul dan berkembang dalam era paska-kolonial dan khususnya masa orde baru, sangat dirasakan kekuatan non-negara mengalami kemerosotan dalam peran dan fungsinya. Namun demikian, menurut Muhammad A.S.Hikam, gerakan keagamaan (Islam), walaupun masuk dalam arus kemerosotan tersebut, harus tetap dipertimbangkan sebagai faktor yang dominan dalam dinamika politik di Indonesia. Tulisan ini berupaya menelaah perkembangan gerakan-gerakan keagamaan (Islam) di dalam kurun 20 tahun terakhir di Indonesia, yang se begitu jauh telah mengungkapkan diri sebagai salah satu dari kondisi sosial dan politik masyarakat sipil di bawah Orde Baru. Dapat disepakati bahwa meskipun terjadi kemerosotan yang drastis dari pengaruh politiknya, agama Islam masih tetap dipertimbangkan sebagai faktor dominan untuk memahami proses politik di Indonesia di masa mendatang.

Islam bukan hanya masih mampu menjadi salah satu sumber arus ideologi politik yang pada gilirannya akan mempengaruhi “budaya” politik dan tindakan di dalam masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi, Islam juga mampu menjadi modalitas melalui mana tuntutan-tuntutan sosial politik artikulasikan dan juga dilaksanakan. Dengan mengutip Geertz, agama sesungguhnya dapat memainkan peranan sebagai faktor integrasi dan disintegratif dalam masyarakat Indonesia.

Sementara itu, pendirian satu negara (sekuler) yang modern dalam era pasca-kolonial dan peningkatan kekuasaan negara dibawah Orde Baru, melalui akumulasi ekonomi dan juga hegemoni ideologi secara signifikan telah melemahkan proses-proses sosial dan politik dalam masyarakat sipil, dan dengan demikian juga menghambat partisipasi politik didalamnya, khususnya di tingkat akar rumput. Kondisi seperti ini memiliki kemungkinan terjadinya situasi konflik yang laten di antara dan dalam negara dan masyarakat sipil. Konflik yang belakangan bahwa makin diperuncingnya oleh konflik status dan juga konflik kelas dalam masyarakat akibat ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Banyak studi mengenai agama dan politik di Indonesia terutama diarahkan pada pengkajian gerakan-gerakan Islam, baik di masa kolonial maupun paska kolonial. Namun demikian, jarang sekali ada studi yang dimaksudkan untuk menjelaskan keterkaitan antara gerakan keagamaan dan munculnya negara (sekuler), moderen yang bertindak sebagai pelaku politik dominan, terutama dalam masa pasca kemerdekaan di Indonesia. Sebagai besar hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa diskursus dominan dalam pengkajian Indonesia tetap berada di bawah bayang-bayang paradigma modernisasi yang cenderung mengabaikan peran negara sebagai pelaku politik yang kekuasaannya terus meningkat dalam menentukan hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi di dalam masyarakat sipil. Dengan demikian, sejauh mengenai pengkajian hubungan antara agama dan politik, kebanyakan studi semacam itu belum beranjak dari pemikiran dikotomis ala Weber yang mempertentangkan antara kesadaran keagamaan versus kesadaran rasional, di mana yang disebut pertama dianggap tidak sesuai, atau setidaknya menghambat modernitas. Gerakan keagamaan umumnya dilihat dalam bentuk reaksi melawan modernitas, dan akibatnya, para akademis

seringkali gagal untuk memperhitungkan sumbangan politik mereka terhadap pertumbuhan masyarakat sipil.

Tulisan ini dimaksud untuk mengisi celah tersebut, pertama dengan menjelaskan muncul dan berperanya negara sebagai pelaku utama di dalam menentukan hubungan-hubungan sosial-politik di Indonesia dalam masa 20 tahun terakhir ini. Selanjutnya akan dilihat juga peran agama, terutama Islam, dan juga kelemahan-kelemahannya, dalam mendorong suatu proses pemerkuatan (*empowerment*) dalam masyarakat sipil berhadapan dengan monopoli kekuasaan oleh negara. Asumsi yang ditekankan disini adalah bahwa agama, baik sebagai sistem makna maupun tindakan, tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu epifenomena dari hubungan-hubungan produksi sebagai terungkap dalam kategori Marxis-ortodoks, atau sebagai sistem makna pra-rasional dalam pemikiran Weberian. Lebih dari itu, agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki kemampuan menjelaskan dalam mengkonstruksi kenyataan sosial di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ia juga merupakan suatu sistem pengetahuan yang mampu menjadi suatu “kontra-diskursus” atau “kontrahegemoni” terhadap ideologi dan tindakan-tindakan dominan yang ada. Kendati demikian, sikap hati-hati harus diambil agar kita tidak menaksir terlalu tinggi terhadap peranan agama. Agama sebagaimana sistem makna dan tidandakan lainnya, juga merupakan wilayah yang cenderung dipergunakan oleh baik negara maupun masyarakat sipil, serta berbagai kelas yang berada di dalamnya, untuk memelihara dan mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Karena itu, agama tidak dapat dilihat sebagai sistem makna yang statis, tetapi selalu harus dilihat dalam keadaan yang terus berubah, dan mampu mengatikusasikan berbagai kepentingan. Untuk mengerti secara memadai gerakan keagamaan sebagai gerakan “kontra-hegemoni” adalah dengan meletakkannya dalam konjunktur sosial dan historis tertentu, terutama pada pembentukan negara dan pertumbuhan masyarakat sipil dalam suatu masyarakat tertentu. Selain itu, kiranya perlu juga dipahami, bagaimana agama dimengerti oleh para pemeluknya sebagai alat untuk mengatasi kenyataan sosial.

Negara Dan Masyarakat Sipil

Munculnya negara Orde Baru pada pertengahan tahun 1960-an menyusul jatuhnya Soekarno, menandai perkembangan baru dan berbeda dari pembentkan negara dalam masa Indonesia pasca-kolonial. Secara ideologis, berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpinnya Soekarno yang dicirikan dengan komitmen-komitmen sosial radikal dan populis. Orde Baru tidak lagi mempertahankan dua komitmen tersebut sebagai penampilan politiknya yang penting. Meskipun gagasan seperti nasionalisme dan juga keadilan sosial tetap diperlihara, tetapi gagasan tersebut cenderung dipahami dengan cara yang agak berbeda. Sudah barang tentu nasionalisme tidak lagi dimengerti dalam konteks radikal anti-kapitalisme sebagaimana pada masa Soekarno, tetapi lebih kurang sebagai suatu kesadaran diri atas kedaulatan nasional dalam masyarakat internasional. Dengan demikian, pengertian nasionalisme telah dicabut dari kecenderungan sosial radikal sebagaimana sebelumnya, karena kendurungan seperti itu akan meletakkan industri dalam posisi yang sulir di dalam pembagian kerja internasional. Semesntara Orde baru tetap mempertahankan gagasan populer seperti kemandirian dan kedaulatan nasional, tetapi ini sudah pasti tidak dijalankan untuk melaksanakan kebijaksanaan isolasionis sebelumnya. Sebaliknya, Orde Baru mengembangkan suatu kebijaksanaan yang lebih akomodatif bagi keberadaannya di dalam sistem internasional. Sebagai contoh dari pada mengisolasi Indonesia dari sistem kapitalis dunia, disepakati bahwa kedekatan hubungan dengan sistem tersebut justru diperlukan untuk melangkah menuju modernisasi dan pembangunan ekonomi negara dimasa mendatang.

Dengan demikian, salah satu ciri negara Orde Baru, mengutip istilah Cardoso, adalah strategi pembangunan bergantung yang berkait (*strategy of associated dependent decelopement*) untuk modernisasi. Ciri lain adalah kemampuan untuk menggerakkan elite strategi syang merupakan tulang punggung negara. Negara dalam era demokrasi liberar dan juga demokrasi terpimpin telah gagal melakukan ini bahkan, terus menerus menhadapi situasi krisis yang tidak habis-habisnya diantara dan didalam negara dan masyarakat sipil. Hanaya dalam peridoe yang sanat singkat di bawaha Soekarno, negara menikmati stabilitas yang relatif. Walaupun situasi ini lebih disebabkan oleh kepemimpinan karismatik Soekarno dari pada keterpaduan elitre-elite yang berkuasa.

Seperti diketahui, negara Orde Baru mendasarkan struktur kekuasaannya pada aliansi longgar antara birokrasi (militer dan sipil), kelompok borjuis nasional dan teknokrat. Disamping itu, begara juga nmemperoleh dukungan kuat dari sisem kapitalis inetenasional dalam bentuk bantuan finansial dan teknologi. Pada kenyataanya, melalui bantuan inilah, negara merencanakan dan menjalankan program pembangun ekonomi. Karena itu, hakekat kekuasaan negara dibawah Orde Baru cenderung menjadi sentralistik dan kebijaksanaannya sering dijalankan melalui strategi atas bawah (*top-down*). Walaupun demikian, negara di sini tidak hanya bertindak sebagai alat dari panitia suatu elite yang berkuasa sebagaimana yang dipahami dalam terminologi Marxi. Tapi sebaliknya, sampai tingkat tertentu negara Orde Baru menikmati otonominya berhadap-hadapan dengan kelas elite, dan memiliki kemampuan melindungi kepentianya sendiri yang kadangkala berbeda dengan kepentingan-kepentingan elite tersebut. Dalam bayak kasus, negara bahkan berposisi terhadap elita, dan pada gilirannya mampu memaksa elite tersebut patuh pada negara. Selain itu, negara dapat juga berperan sebagai mendiator manakala terjadi konflik kepentingan di anatar fraksi-fraksi kelas di dalam elite atau diantara elite dengan kelas-kelas yang tertindas. Dalam hal ini, negara dapat melingungi kepentingannya dengan membuat kompromi dengan elite atau kelas-kelas yang tertindas.

Bukanlah hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa dalam dua puluh tahun terkahir ini, Orde Baru telah menikmati tingkat stabilitas politik yang tinggi, dan juga mampu mendorong pembangunan ekonomi. Situasi ini tidak pernah terjadi semenjak kemerdekaan Indonesia pada 1945. Birokrasi negara terutama dalam lembaga eksekutif makin berkembang sebagai aparat efektif yang memiliki kemampuan mengelola dan menangani mobilitas politik untuk mendukung kebijaksanaan negara. Lebih dari itu, negara juga telah berhasil mengotrol masyarakat sipil melalui berbagai cara korporatis, dan mendapatlan konsensus politik melalui hegemoni ideologi. Dibawah Orde Baru, seluruh organisasi sosial dan politik secara ketat dikontrol melalui sejumlah regulasi sehingga membuat mereka tidak mungkin menjadi ancaman yang berbahaya terhadap negara. Sejauh ini, negara juga telah berhasil mengurangi jumlah partai politik yang ada dari 10 pada tahun 1971 menjadi hanya 3 di tahun 1973, yakni Golkar, PDI dan PPP. Kemudian, dalam upayanya untuk meminimalisasi konflik-konflik politik dan ideologi, negara juga melarang mereka memakai ideologi ain, kecuali Pancasila, sebagai basis diskursus politik mereka. Dengan demikian, secara umum, masa "Politik aliran" yang telah mendomonasi politik Indonesia berakhir. Alasan di balik pernyataan ini adalah bahwa negara tidak lagi berupaya untuk bersikap netral dalam meredakan instabilitas politik yang diakibatkan konflik ideologi yang mungkin terjadi di antara partai-partai politik. Proses pembangunan ekonomi, yang sering diungkapkan dengan begitu retorika, memerlukan satu derajat yang tinggi dari stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Pluralitas ideologi dilihat sebagai konsep Barat dan merupakan sumber pertentangan politik, karena kecenderungannya untuk dimanipulasi bagi peketingan dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Persatuan ideologi di bawah Pancasila dikenal sebagai proses "pengasastunggalan" dimaksudkan untuk membuat konflik-konflik ideologi dalam politik Indonesia di

masa-masa mendatang sebagai irelevan dan usang. Dengan persatuan atau unifikasi ideologi seperti ini, kelompok-kelompok politik yang ada diikuti untuk berkompetesi satu sama lain dengan dasar program-program politik mereka yang riil, dan bukan atas dasar retorika politik.

Sejauh menyangkut format politik baru, kelihatannya hanya partai yang berkuasa, Golkar, yang sangat siap untuk itu, dan karenanya, mampu mengambil keuntungan dari struktur politik yang baru tersebut. Golkar yang bersal dari kelompok fungsional, pada awal tahun 1960-an, telah mengubah dirinya dalam sekejap setelah keruntuhan Demokrasi Terpimpin, untuk menjadi mesin politik Orde Baru. Keanggotaan umumnya terdiri dari pegawai pemerintah dan paea profesional di mana mereka dikelompokkan dalam berbagai organisasi profesional. Yang belakangan ini meliputi asosiasi petani, serikat buruh, asosiasi pengusaha atau industriawan, asosiasi guru dan banyak organisasi sosial lainnya yang secara sukarela maupun tidak., berafiliasi dengan Golkar. Pendek kata, Golkar telah menjadi suatu aparat negara yang efektif dalam pengelolaan korporatis yang ditujukan untuk memobilisasi masyarakat sipil dalam rangka meraih dukungan politik dari massa. Melalui peranan Golkar, “strategi inklusionari” (*inclusionary strategy*) dari perangkat korporatis Negara telah berlaku. Strategi ini dijalankan terutama, melalui berbagai tipe kooptasi organisasi-organisasi sosial dan juga para pemimpinnya ke dalam mesin politik.

Bersama dengan pengelolaan korporatis negara terhadap organisasi-organisasi politik dalam masyarakat, terdapat juga suatu strategi melemahkan partisipasi politik “akar rumput”. Ini disebut kebijaksanaan “massa mengambang” yang diberlakukan pada awal tahun 1970-an. Kebijakan itu ditunjuk untuk mencegah daerah pedesaan menjadi aktif secara politis sebagaimana terjadi pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Politisasi daerah pedesaan dikecam oleh Orde Baru sebagai faktor yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan politik, di masa lalu. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan, maka perlu bagi negara untuk mengatasinya serta mengecilkan keterlibatan langsung mereka dalam dunia politik. Pengalaman pahit selama tahun 1960-an selalu diangkat oleh negara untuk menjustifikasi proses penyingkiran masyarakat pedesaan ini. Jarang sekali diungkapkan bahwa kemiskinan masyarakat dan distribusi pendapatan yang timpang di wilayah pedesaan adalah faktor paling penting yang banyak menyumbang terjadinya konflik sosial dan politik di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, pengasingan wilayah pedesaan dari dunia politik praktis adalah salah satu upaya transportasi politik yang paling fundamental yang dijalankan untuk menjamin stabilitas politik Orde Baru. Dengan mengendalikan mayoritas masyarakat dari keterlibatan politik langsung, maka negara dapat dengan mudah mengontrol persoalan politik wilayah pedesaan, dan juga untuk memobilisasi dukungan politik dari bawah.. Yang terakhir ini terutama di lakukan melalui aparat negara mulai dari tingkat kecamatan sampai ke pedesaan yang tugasnya, di samping mengurus persoalan administratif, adalah juga mendukung Golkar dan memperkuat kekuasaan politiknya.

Setelah membahas cara bagaimana negara orde Baru memobilisasi dukungan politik melalui perangkat korporatis negara, di bawah ini akan dijelaskan hegemoni ideologi Negara yang ditujukan pada masyarakat sipi dalam upaya memperoleh dukungan politik mereka. Tidak pernah dalam sejarah Indonesia sebelumnya, Negara mampu menggunakan hegemoni ideologi seefektif yang dilakukan Orde Baru. Sebagaimana disebutkan di bagian depan tulisan ini, negara dapat menggunakan ideologi nasional Pancasila sebagai satu-satunya dasar bagi organisasi-organisasi sosial dan politik. Proses hegemoni ideologi ini tidak hanya ditempuh melaui cara-cara legalistik tetapi juga melalui sistem pendidikan. Penataran P4 (pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) adalah program yang disponsori negara untuk mendidik seluruh lapisan masyarakat memahami ideologi dan interpertasi resmi negara

mengenai ideologi tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin keseragaman pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pluralitas pemahaman selalu dilihat sebagai tantangan terhadap semangat persatuan, dan ini selalu diwaspadai sebagai jalan menuju kerusuhan dan konflik sosial politik. Hal ini besar dalam hal pertentangan paham mengenai Pancasila antara elemen Islam di satu pihak, dan elemen nasionalis di pihak lain. Melalui keseragaman pemahaman, tidak akan ada lagi pertentangan mengenai ideologi negara, dan lebih penting lagi, mengenai hakekat dari negara Indonesia. Sebagai contoh, menurut pemahaman negara, Indonesia bukanlah negara teokratik ataupun negara sekuler. Sebagai negara yang non-sekuler, pemerintah mengakui keberadaan sistem kepercayaan agama, dan wajib mendorong dan memajukan perkembangannya melalui dukungan dan kebijaksanaan negara. Sebaliknya, sebagai negara non-teokratik, tidak dibolehkan ada satupun agama yang bisa diklaim sebagai Agama resmi negara. Juga diakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah salah satu dasar normatif di antara masyarakat Indonesia telah membangun dirinya sepanjang sejarah, dan karenanya ditolak ateisme. Dengan demikian negara Indonesia tidak dapat dianggap sebagai sebuah negara teokratik dalam pengertian yang klasik. Bangsa Indonesia lahir sebagai suatu fenomena modern, berakar dari perjuangan bangsa dan didasarkan pada kesepakatan untuk membangun suatu negara-negara (*nation-state*) yang modern. Ini adalah nasionalisme moderen dan demokrasi yang telah menjadi dasar ideologi, dan karenanya ide mengenai negara yang didasarkan pada agama tertentu tidak dapat diterima, karena hal ini akan menghilangkan sumbangan agama yang lain di dalam membangun Indonesia moderen.

Demikianlah seraya mengakui Islam sebagai agama mayoritas, negara tidak akan mentoleransikan setiap upaya apapun untuk menciptakannya sebagai suatu ideologi politik yang khas. Dengan cara ini, Islam di bawah Orde baru, hanya bisa berfungsi sebagai salah satu di antara basis-basis normatif seperti halnya sistem-sistem nilai lain yang ada di Indonesia. Digunakannya Islam sebagai ideologi politik hanya akan mendorong beberapa kelompok Islam untuk menentang legitimasi negara. Bukti-bukti sejarah mengenai usaha semacam itu bisa dilihat dalam berbagai gerakan separatis yang menggunakan Islam sebagai ideologi seperti halnya DI/TII dan usaha-usaha lain oleh apa yang kemudian dikenal sebagai kelompok Komando Jihad untuk mendirikan sebuah negara Islam.

Hegemoni negara tidak hanya tampak dalam pengertian mengenai konstruksi ideologi yang formal dari negara, tetapi lebih penting lagi juga dalam proses produksi dan reproduksi sosial. Ini khususnya menjadi jelas dalam di kursus tentang modernitas selama dua dasawarsa terakhir ini. Di sini, negara lagi-lagi menguasai diskursus semacam itu, khususnya sejauh menyangkut pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Bahkan hanya proses pembangunan telah dikarakterisasikan oleh dukungan kuat dari negara. Tetapi juga bahwa negara kemudian menjadi penterjemah dominan proses modernisasi. Masyarakat sipil tetap akan tertinggal di belakang dalam membentuk diskursusnya sendiri, oleh karenanya pengaruh negara untuk mengatur proses-proses sosial, ekonomi dan politik menjadi tak tertandingi. Negara telah berkembang begitu kuat bersamaan dengan melemahnya masyarakat sipil. Kontrol hegemonik negara terhadap diskursus dari proses politik mempersulit masyarakat sipil untuk mengembangkan otonominya yang krusial dalam proses pembangunan politik dan penciptaan masyarakat demokrasi.

Hegemoni negara khususnya diperkokoh melalui jaringan dan perangkat birokratis dan teknokratis. Ini meningkatkan kita kepada gagasan mengenai otoritarianisme birokratis yang diperkenalkan oleh I'Donnell satu dasawarsa yang lalu ketika dia menjelaskan pengalaman beberapa negara Amerika Latin. Di negara-negara ini pertumbuhan negara juga tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan kapitalis, khususnya setelah terjadinya proses industrialisme yang mendalam. Negara dipaksa untuk memonopoli masyarakat sipil dengan

mepertaruhkan partisipasi politik massa dalam rangka mempercepat pembangunan kapisitas dalam bentuk industrialisasi berorientasi ekspor. Dengan melakukan hal ini, negara menjadi semakim tergantung pada birokrasi (baik militer maupu sipil), kaum teknokrat, dan modal asing yang sangat diperlukan untuk memelihara akumulasi modal domestik, pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pasar.

Perana kaum militer dan teknokrat menjadi sangat dominan di negara-negara ini utnuk menjadi tingkat pertumbuhan ekonimi yang tinggi dan stabilitas politik. Kendatipun apa yang terjadi dalam negera Orde Baru tidak bisa dipahami begitu saja mengikuti kerangka O'Donnel ini, jelas bahwa aliansi anatar militer dan teknokrat di Indoesia merupakan startegis politik yang mirip dengan logika strategi pembangunan bergantung (*dependent development strategy*) yang diteraopkan di beberapa negara Amerika Latin. Demikianlah, birokratis sipil terutama ditujukan untuk mengelola berbagai aspek dari proses sosial dan politk, termasuk untuk memobilitas suara. Kecendrungan kearah birokratisasi-berlebih dalam masyarakat sipil di Indonesia dewasa ini, tidak lain adalah sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan strategi semacam itu.

Dengan pembahasan di atas, menjadi jelas bahwa hubungan anatar negara dan masyarakat sipil dalam konjunktur masa kini dikarakterisasikan oleh ketergantuan yang kuat dari yang terakhir kepada yang pertama. Masyarakat sipil Indoesia selalu berada dalam posisi subordinat, khususnya bagi mereka yang berada pada strata sosial bawah. Kebutuhan akan adanya suatu peranan politik yang lebih luas dalam masyarakat sipil, karena itu, merupakan tantangan mendesak dalam masa depan yang dekat ini untuk memperlancarkan proses demokratisasi. Proses itu sendiri tidak hanya terbatas dalam pengertian ditingkatkannya institusionalisasi politik, tetapi yang lebih penting lagi adalah dubukanya partisipasi poltik pada tingkat "akar-rumput". Ini akan mencakup revitalisasi kemampuan organisasi-organisasi sosial *vis-à-vis* kekuasaan dominan dari negara dalam menciptakan praktek-prekatek sosial politik. Persis dalam konteks inilah agama dapat memainkan peranan penting di Indonesia, yakni sebagai suatu sumber diskursus dan praktek-praktek sosial politik yang penting dari masyarakat sipil, bersama-sama dengan struktur makna lainnya.

Agama Dan Pertumbuhan Masyarakat Sipil

Secara historis, agama telah memaikan peranan besar dalam merangsang aksi-aksi sosial dan politk untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan. Selama periode kolonial, banyak sekali gerak sosial yang berdasarkan agama ditujukan untuk mengingkari hegemoni negara dan menegaskan ruangan siosial dan politik mereka sendiri. Banyak gerakan milenarian di Indonesia didasarkan pada ajaran-ajaran eskatologis agama, misalnya seperti Imam Mahdiisme atau gerakan Ratu Adil yang semuanya bertujuan utnuk menegakkan sebuah masyarakat yang ideal, bebas dari ketidakadilan sosial dan penidasan politik yang dilakukan negara. Kendatipun gerakan-gerakan ini sebagai besar tidak berorganisasi dengan baik, tak sistematis dalam program-programnya, dan karenanya dengan mudah bisa digasak oleh negara, tapi signifikansinya sebagai perlawanan sosial dari masyarakat sipil tidak bisa diabaikan begitu saja. Gerakan-gerakan itu memperlihatkan kemampuan masyarakat sipil untuk melawan ideologi dominan dan praktek-praktek negara.

Perkembangan kesadaran keagamaan sebagai suatu struktur makna yang khas dan mampu menyediakan mode pemahaman diri secara sosial dan politik, juga mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia. Melihat kembali lahirnya nasionalisme Indonesia modern, suatu gagasan yang dirumuskan dengan interpretasi sekuler, ia terutama diartikulasikan menurut bentuk solidaritas dan sentimen keagamaan. Dengan demikian, nasionalisme sebagai suatu bentuk "masyarakat yang dibayangkan" (*imagined community*),

mengutip Aderson, adalah perluasan yang tak terpisahkan dari gagasan solidaritas keagamaan. Misalnya, dalam diskursus politik Islam, konsep mengenai nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari gagasan tentang “umat”. Bukan karena kebetulan jika Syarikat Islam (SI) pada 1912 menjadi organisasi sosial pertama yang berhasil menanamkan benih nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat bawah dan cendekiawan-cendekiawan kelas menengah. Meskipun kemudian nasionalisme Indonesia telah mengalami, transformasi sejak 1930-an dan tidak lagi diinterpretasikan dengan suatu pemahaman keagamaan pengaruh dari gagasan-gagasan keagamaan tetap saja tampak.

Kesimpulan

Tulisan ini tidak berpretensi memberikan sebuah kajian yang tuntas mengenai peranan yang dimainkan agama dalam aksi-aksi sosial politik selama dua dekade terakhir di Indonesia. Tujuan khususnya hanyalah untuk mengemukakan sebuah pemahaman mengenai gerakan keagamaan dalam kaitannya dengan kekuasaan negara yang dominan. Dikatakan bahwa agama mampu menyediakan alternatif untuk tumbuhnya masyarakat sipil yang sehat dan menyumbangkan keterbukaan politik di masa depan. Sebagai struktur makna yang khas, agama tidak hanya bisa dianggap sebagai sebuah antitesis terhadap modernitas, tetapi juga sebagai kritik terhadap interpretasi dominan atas modernitas, Sebagai sistem makna ia bisa digunakan sebagai sumber dari mana diskursus-diskursus sosial dan politik lainnya dikembangkan dari artikulasikan oleh masyarakat sipil untuk menghadapi dominasi negara.

Kendati demikian, gerakan keagamaan sebagai suatu aksi sosial politik juga mengidap suatu bahaya, yakni timbulnya suatu diskursus yang monolitik atau struktur politik yang otoritas. Ini khususnya benar jika gerakan keagamaan itu gagal mengendepankan dan mengembangkan tujuannya sendiri di balik klaim-klaim keagamaan mengenai kebenaran. Mereka akan cenderung menjadi gerakan yang elitis dan eksklusif sehingga menghalanginya untuk menghargai gerakan berdasarkan struktur makna yang lain. Kecenderungan jenis ini misalnya tampak jelas dalam gerakan fundamentalisme dan milenarianisme. Karena itu menjadi penting bagi gerakan keagamaan di Indonesia dewasa ini untuk menyadari tendensi parakhalistik semacam itu. Dalam pandangan saya, agama masih dalam masyarakat sipil, khususnya bagi mereka yang berada di tingkat ‘akar-rumpun’. Para pemimpin agama dan kalangan cendekiawanya harus mengarahkan kegiatannya untuk membela kepentingan politik masyarakat bawah agar mereka bisa memperoleh pengaruh yang lebih signifikan. Sebagai contoh, mereka bisa mendorong masyarakat bawah untuk menjadi lebih sadar dan lebih percaya diri secara politik. Mereka juga bisa membantu masyarakat bawah untuk menanggulangi permasalahan sendiri melalui pendidikan, program pemandirian, dan pelatihan lainnya. Peranan LSM yang berdasarkan agama akan menjadi instrumen untuk memperlancar program pragmatis semacam ini.

Persolalan mendesak yang dihadapi LSM semacam itu adalah meminimalkan ketergantungannya kepada negara dalam segala bentuknya. Otonomi total adalah masalah yang dihadapi mereka dibawah struktur politik yang ada sekarang. Mereka harus lebih sensitif terhadap usaha intervensi negara yang terlampau besar yang mungkin membawa resiko bagi kegiatan memperkuat politik, akar-rumpun”. Tidak bisa diragukan bahwa negara tidak akan membiarkan mereka bergerak di wilayah pedesaan atau kalangan masyarakat miskin perkotaan tanpa pengawasan ketat. Karena itu mereka seyogyakata memiliki strategi yang cukup lentur dalam mengembangkan kegiatan mereka untuk memperkuat masyarakat sipil dalam jangka panjang.

Akhirnya, juga menjadi penting untuk mengkaji peranan yang bisa dimainkan oleh agama dalam proses memperkuat masyarakat sipil yang di manifestasikan dalam pengalaman

kehidupan sehari-hari. Bagaimana ajaran-ajaran agama ditafsirkan dalam dan dilaksanakan dalam kehidupan riil agar bisa mempengaruhi praktek politik mereka. Sebagai sistem makna, agama akan terus menerus diambil-ambil baik oleh kekuasaan dominan maupun oleh masyarakat dalam rangka menjustifikasi kepentingannya sendiri, termasuk oleh mereka yang berada dalam domain relasi politik. Karena itu, konflik interpretasi bisa terjadi menyangkut beberapa ajaran agama, dan antara agama dengan struktur makna lainnya. Inilah yang membuat agama menjadi suatu arena konflik yang khas. Sebagai konsekuensinya, agama tidak bisa dilihat sebagai entitas yang statis dan tunggal yang arah dan tujuannya bisa diramalkan.

Eksistensi gerakan keagamaan dan pengaruhnya terhadap masa depan politik Indonesia, sebagai akan ditentukan oleh hubungan dialektif antara pembangunan negara dan pengembangan masyarakat Sipil.

Daftar Pustaka

Abu Al-Hasal A;-Nadwi, *Islam Membangun Peradaban Dunia*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1988.

Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung, Pustaka 1984.

Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970

H.J. de Graafi, *Clearing Up The Past to Prepare The Future*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1996.